

**PERAN SOSIALISASI POLITIK PADA PEREMPUAN  
UNTUK TERLIBAT POLITIK**

Fernando EMAS<sup>1</sup>

E mail: f\_maraden@yahoo.com

**Abstrak**

(Banyaknya hambatan perempuan untuk terlibat dalam politik, tidak menghalangi sebagian perempuan untuk terlibat dalam politik. Ada berbagai hal yang mempengaruhi perempuan berkeinginan terlibat dalam politik. Sosialisasi memiliki peran penting dalam keterlibatan perempuan pada bidang politik. Keluarga memberikan peran yang dominan sebagai agen sosialisasi dibandingkan agen sosialisasi lainnya. Implikasi teoritis menunjukkan bahwa sosialisasi yang diterima oleh perempuan berpengaruh terhadap sikap politik mereka walaupun budaya patriarki masih tetap sebagai salah satu penghalang bagi perempuan untuk terlibat dalam politik. )

**A. Latar Belakang Masalah**

Posisi perempuan yang selalu dinomorduakan menjadi permasalahan tersendiri bagi bangsa ini mengingat perempuan seharusnya mengambil peran yang penting dalam pembangunan. Perempuan selalu diasosiasikan hanya mengambil peran sebatas urusan-urusan domestik yang hanya seputar rumah tangga. Hal ini bukan suatu kebetulan tapi sudah menjadi konstruksi budaya yang sudah menjadi tradisi dan merugikan pihak perempuan, karena akan berimbas kepada ketidakadilan dalam mendapatkan kesempatan untuk tampil dalam kehidupan politik.

Dalam realita kehidupan politik ada banyak fakta yang muncul di permukaan yang mengesampingkan peran kaum perempuan dalam wilayah politik, padahal wilayah politik merupakan wilayah yang sebetulnya didukung oleh seluruh warga negara baik laki-laki maupun perempuan. Wilayah politik merupakan salah satu wilayah yang strategis untuk menentukan nasib bangsa, termasuk untuk kenaikan nasib kaum perempuan itu sendiri yang selama ini masih diposisikan sebagai *second person*<sup>2</sup>. Asumsi yang condong untuk mengesampingkan peran kaum

---

<sup>1</sup> Direktur Rumah Politik Indonesia dan Dosen Ilmu Politik, FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

<sup>2</sup> Tari Siwi Utami, *Perempuan Politik Departemen : Sebuah Sketsa Perjuangan dan Pemberdayaan, 1999-2001*, ( Jakarta: Gama Media, 2001), hal. 55.

perempuan dalam wilayah politik antara lain adalah adanya asumsi bahwa dunia politik merupakan dunia kaum laki-laki dan tidak cocok untuk kaum perempuan. Munculnya pandangan tersebut yang menilai bahwa politik itu kotor, keras, penuh kritik, sadis, tidak kenal ampun dan semacamnya.

Keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam dunia politik diawali dari Kongres Perempuan Indonesia yang pertama di Yogyakarta pada 22 Desember 1928<sup>3</sup> menjadi awal kemudian ditandai dengan masuknya perempuan dalam keanggotaan perelemen pada pemilu tahun 1955<sup>4</sup>. Keanggotaan perempuan pada saat itu dinilai sudah cukup berarti dan tidak hanya sebagai pelengkap atau asesoris belaka. Namun di balik berbagai keberhasilan itu ternyata kondisi peran perempuan dalam dunia politik menjadi sangat buruk apabila dibandingkan dengan peran kaum laki-laki dalam dunia politik. Komposisi jumlah pemilih perempuan dan laki-laki hampir seimbang yakni 50,04% laki-laki dan 49,96% perempuan dari seluruh pemilih pada pemilu 2014. Dengan jumlah pemilih yang hampir seimbang tersebut dari 560 jumlah DPR RI perempuan yang duduk di Parlemen hanya mencapai 17,32 persen atau 97 anggota. Tinggi rendahnya partisipasi politik perempuan secara kuantitatif di Indonesia dapat kita lihat dari minimnya jumlah keterwakilan perempuan yang duduk dalam berbagai lembaga politik misalnya dalam lembaga legislatif dan partai politik.

Minimnya jumlah keterwakilan kaum perempuan dalam lembaga legislatif yaitu di DPR RI selama ini dapat terlihat dalam tabel berikut:

#### **Tingkat Representasi Perempuan di DPR RI Tahun 1950-2019**

<b>Masa Kerja DPR</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Laki-laki</b>
1950-1955 (DPRS)	9 (3,8%)	236 (96,2%)
1955-1960	17 (6,3%)	272 (93,7%)
1956-1959 (Konstituante)	28 (5,1%)	488 (94,9%)
1971-1977	36 (7,8%)	460 (92,2%)
1977-1982	29 (6,3%)	460 (93,7%)
1982-1987	39 (8,5%)	460 (91,5%)
1987-1992	65 (13%)	500 (87%)

<sup>3</sup> Isbodroini Suyanto, "Peran sosialisasi Politik Terhadap Partisipasi Politik Perempuan", dalam T.O. Ihromi, *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hal.486. dan Kowani, *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1978).

<sup>4</sup> Khofiah Indar Parawansa, "Hambatan terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia", *Perempuan di Parlemen : Bukan Sekedar Jumlah*, (Jakarta: IDEA, 2002), hal.41.

1992-1997	62 (12,5%)	500 (87,5%)
1997-1999	54 (10,8%)	500 (89,2%)
1999-2004	46 (9%)	500 (91%)
2004-2009	64 (11,7%)	486 (88,3%)
2009-2014	103 (18,39%)	457 (81, 61 %)
2014-2019	97 (17,32%)	463 (82,68%)

Sumber : Sekretariat DPR RI, 2015.

Jika dicermati lebih lanjut berdasarkan data yang ada pada tabel diatas ternyata representasi perempuan Indonesia dalam keanggotaan legislatif mengalami naik turun mulai tahun 1950 hingga saat ini. Representasi tertinggi terdapat pada tahun 2009-2014 yang mencapai 18,39% atau sebanyak 103 anggota DPR RI dari kalangan perempuan.

Hambatan yang dirasakan oleh perempuan untuk berpartisipasi dalam politik adalah hambatan politik, ekonomi dan ideologi. Hambatan politik tersebut adalah mengenai sistem politik termasuk disini sitem pemilu dan tingkat demokrasi. Dalam sistem politik dan tingkat demokrasi mempengaruhi pola rekrutmen yang ditentukan oleh sistem politik melalui undang-undang yang dilakukan oleh partai politik<sup>5</sup>.

### **A.1. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran sosialisasi politik melalui agen-agen sosialisasi politik yang mendorong perempuan aktif dalam politik?
2. Bagaimanakah proses rekrutmen anggota legislatif perempuan di partai politik?

### **A.2. Kajian Literatur**

Penelitian tentang peran sosialisasi terhadap partisipasi politik perempuan pernah dilakukan oleh Isbodroini Suyanto<sup>6</sup> pada tahun 1995 terhadap tiga partai politik (Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia(PDI) dan Golkar). Penelitian dilakukan terhadap pengurus dan juga kader perempuan di wilayah DKI Jakarta. Pemelihan responden peneliti dilakukan dengan cara acak dari masing-masing wilayah di DKI Jakarta dengan memperhatikan keaktifan anggota.

---

<sup>5</sup> Ani Soetjipto, "Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Melalui Reformasi Konstitusi dan Pemilu, dalam" *Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan*, (Jakarta: IDEA, 2003), hal.9

<sup>6</sup> Salah satu dosen Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tahun 1995 tentang Peran Sosialisasi Politik Terhadap Partisipasi Politik Perempuan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Isbodroini Suyanto bahwa responden terlibat dalam politik sangat dipengaruhi oleh organisasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa pengaruh sosialisasi melalui agen-agen sosialisasi memberikan peran yang tidak cukup kecil dalam membentuk sikap dan orientasi politik para responden.

Keluarga sebagai salah satu agen sosialisasi yang memiliki peran sejak sianak kecil kurang begitu tinggi dalam mempengaruhi responden terlibat dalam politik<sup>7</sup>. Namun berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran keluarga tidak memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mendorong perempuan berpartisipasi politik. Organisasi yang memberikan pengaruh besar menumbuhkan partisipasi politik perempuan.

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Miryam Fithtriati menjelaskan tentang peran partai politik untuk mendongkrak peran politik perempuan secara kuantitas dan kualitas dengan melakukan *affirmative action* berkaitan dengan fungsi partai yaitu rekrutmen dan pendidikan politik. Partai juga diwajibkan membuka kesempatan yang luas kepada para anggota perempuan dan menjamin terpenuhinya hak dan kepentingan politik setiap anggota partai. Peran organisasi dan aktivis pembela hak perempuan dalam partai politik merupakan aspek lain yang secara signifikan menentukan peningkatan keterwakilan perempuan<sup>8</sup>.

### **A.3. Kerangka Teori**

#### **1. Partai Politik**

Partai politik pertama-tama lahir di Negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik, telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain yang lahir pada abad ke-19. Partai politik umumnya dianggap sebagai manifestasi dari suatu system politik yang sudah modern atau yang sedang dalam proses memodernisasikan diri.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Isbodroini Suyanto, 1995, *Op.Cit*, hal.497.

<sup>8</sup> Miryam Fithtriati, "*Peran Partai dan Perempuan Partai Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Menjelang Pemilu 2004 (Studi Kasus Pada Enam Partai Peserta Pemilu 2004)*", Tesis Ilmu Politik, FISIP-UI, 2006, Hal.167-168. Selain itu juga ada tulisan dari Rieta Fuad, "*Perempuan dan Politik (Kepatuhan Partai Golkar, PDI-P dan PKB terhadap Pemberlakuan Kuota Perempuan 30% bagi Caleg DPR RI)*", Tesis Ilmu Politik, FISIP-UI, 2006. Serta hasil penelitian Banu Prabowo: "*Kesadaran Gender Pemilih Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2004 (Studi Kasus Terhadap Perempuan PNS di Kantor Arsip Nasional RI)*", Tesis Ilmu Politik, FISIP-UI, 2005.

<sup>9</sup> Miriam Budiardjo (Edisi Revisi), *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2007), hal.397-398 dan Deliar Noer (Eds), *Pengantar Ke Pemikiran Politik*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hal.208.

Miriam Budiardjo mengartikan partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu melaksanakan kebijakan mereka.<sup>10</sup>

Menurut Ichlasul Amal, partai politik ialah sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah<sup>11</sup>.

Beberapa fungsi partai menurut Miriam Budiardjo sebagai berikut:

1. *Sosialisasi politik*. Proses dimana seseorang memperoleh pandangan, orientasi, dan nilai-nilai dari masyarakat di mana ia berada, proses itu juga mencakup proses di mana masyarakat mewariskan norma-norma dan nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi berikutnya.
2. *Rekrutmen politik*. Proses melalui mana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik.<sup>12</sup>

Partai politik dalam melakukan rekrutmen politik dilakukan dengan cara terbuka. Sebagai sebagai salah satu pilar demokrasi partai politik tentunya dapat melakukan perekrutan terhadap calon-calon kader partai politik dengan cara-cara yang demokrasi dan terbuka. Begitu juga kesempatan yang diberikan kepada perempuan yang sebelumnya diberi ruang yang sempit untuk dapat berpartisipasi dalam politik.

## **2. Sosialisasi**

Gabriel A. Almond mengatakan bahwa sosialisasi merupakan suatu proses pewarisan nilai dan sikap yang berlaku di masyarakat untuk memperkenalkan nilai-nilai politik kepada anak sejak mereka masih anak-anak. Sehingga sudah ada suatu pemahan atau sikap yang dimiliki anak ketika mereka sudah dewasa<sup>13</sup>.

”sosialisasi politik adalah bagian dari proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Kebanyakan anak-anak, sejak masa kanak-kanaknya, belajar memahami sikap-sikap dan harapan-harapan politik yang hidup dalam masyarakatnya.

---

<sup>10</sup> Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1982), hal. 14-22.

<sup>11</sup> Ichlasul Amal (Eds). *Teori-teori Mutakhir Partai Politik Edisi Revisi*. (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1996), Hal. xv.

<sup>12</sup> Miriam Budiardjo, 1982, *Op.Cit.* hal.14-22.

<sup>13</sup> Mas'ood, Mohtar dan Colin MacAndrews (Eds), *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), hal.34.

Proses sosialisasi sebagai upaya untuk membentuk individu sebagai pribadi yang tangguh dan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Pribadi atau makhluk sosial ini merupakan kesatuan integral dari sifat-sifat individu yang berkembang melalui proses sosialisasi. Selain faktor sifat dasar dan lingkungan internal, masalah karakteristik atau ciri khas yang berbeda dari masing-masing individu merupakan salah satu faktor mempengaruhi proses sosialisasi. Sejak saat dilahirkan, anak tumbuh dan berkembang sebagai individu yang unik berbeda dari individu-individu yang lain. Jadi dalam proses sosialisasi politik untuk kalangan perempuan agar perempuan aktif dalam politik sangat dibutuhkan pemahaman karakter individu. Dengan pemahaman karakter individu perempuan ini dapat ditanamkan nilai atau tentang kesadaran gender.

Gabriel A. Almond dalam Mohtar Mas'ood dan Colin MacAndrews menekankan bahwa sosialisasi politik merupakan sosialisasi tentang nilai-nilai politik yang membentuk seseorang untuk menentukan sikap-sikap politik atau mengambil suatu keputusan politik.<sup>14</sup>

Agen-agen sosialisasi ini dapat memberikan pendidikan sejak kecil maupun berbagai bentuk indoktrinasi kepada perempuan bahwa tidak ketabuan bagi perempuan untuk aktif dalam politik. Muara akhir yang diharapkan adalah tertanamnya kesadaran gender bahwa perempuan memiliki kesetaraan dengan laki-laki dalam ranah politik.

Begitu juga dengan partai politik sebagai salah satu lembaga politik yang mempunyai fungsi untuk melakukan sosialisasi politik dan juga yang melakukan rekrutmen politik. Sehingga peran partai politik sangat diharapkan dalam melakukan sosialisasi politik untuk keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan oleh partai politik ataupun yang dilakukan oleh negara.

Menurut Almond sosialisasi politik dapat dilakukan melalui keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, pekerjaan, media massa dan juga kontak-kontak politik langsung. Keluarga merupakan struktur sosial pertama yang melakukan sosialisasi terhadap seseorang kemudian beranjak ke sekolah sebagai lembaga formal yang pertama memperkenalkan seseorang secara lebih mendalam terhadap sistem politik melalui pendidikan.<sup>15</sup>

### **3. Partisipasi Politik**

Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintahan (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum,

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal.34.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal.40.

menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya<sup>16</sup>.

Menurut Herbert McClosky kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembuatan kebijakan umum.<sup>17</sup>

Partisipasi politik perempuan dinilai penting untuk memperbaiki nasib ketertindasan perempuan dalam kehidupan sekarang ini. Dengan terjun di dunia politik secara langsung melalui aktivitasnya dalam politik pandangan masyarakat mengatakan politik sebagai dunia laki-laki akan berkurang setidaknya dapat digunakan untuk mengontrol isu-isu gender melalui kebijakan yang tidak berorientasi pada ketimpangan dan pertimbangan gender.

Partisipasi politik perempuan tentunya masih mendapat hambatan melalui kultural dan politik. Sehingga perempuan perlu melakukan tindakan untuk bisa merubah budaya patriarki menjadi budaya demokrasi. Patriarki yang bersikap diskriminasi tentunya sangat menghambat perempuan berperan.

#### **4. Metode Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan tentang peran sosialisasi politik oleh agen-agen sosialisasi politik. Dengan demikian metode penelitian yang dipakai adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui peran sosialisasi politik dalam mendorong perempuan aktif dalam partai. Menurut Sanafiah Faisal<sup>18</sup> metode penelitian deskripsi dimaksudkan sebagai upaya eksplorasi dan klasifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Penelitian ini berusaha menggambarkan (deskripsi) sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Metode penelitian kualitatif-deskriptif digunakan untuk berupaya memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang dengan tujuan utama untuk membuat penggambaran tentang sesuatu keadaan secara obyektif dalam deskriptif situasi.

Metode kualitatif diartikan oleh Bogdan dan Taylor<sup>19</sup> sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini langsung menunjukkan setting dan individu-individu dalam setting secara keseluruhan; subyek penyelidikan, baik berupa organisasi maupun individu, tidak dipersempit menjadi variabel yang terpisah atau hipotesis, melainkan di pandang sebagai keseluruhan.

---

<sup>16</sup> Miriam Budiardjo, 1982, *Op.Cit*, hal. 1.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal.1 dan Miriam Budiardjo, 2008, *Op.Cit*, hal. 367.

<sup>18</sup> Sanafiah Faisal, *Metode Penelitian Sosial Dasar dan Aplikasi*, (Jakarta: Penerbit Rajawali Press, 1989), hal. 18.

<sup>19</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset), 1990, hal. 4.

## **B. PEREMPUAN DAN POLITIK**

### **B.1. Perjuangan Perempuan Memasuki Kancah Politik**

Patriarki selama ini merupakan norma-norma atau keharusan yang disepakati (sistem nilai) serta cara berfikir (budaya) yang berkembang dalam masyarakat Indonesia telah menempatkan perempuan pada posisi sebagai kelompok lemah yang perlu diajari, dibimbing, dan diamankan. Semua itu membuat pembenaran bahwa perempuan tidak bisa dengan leluasa berperan di lingkungan masyarakat yang lebih luas atau lebih sering disebut wilayah publik, melainkan harus tinggal di rumah demi keamanannya, dan berkonsentrasi untuk urusan rumah tangganya karena dianggap begitulah seharusnya menjadi seorang perempuan. Sehingga budaya patriarki memosisikan perempuan hanya untuk wilayah domestik saja.

Peran perempuan sebagai penanggungjawab urusan rumah tangga dan keluarga telah mempersempit ruang gerak perempuan untuk berada di luar rumah (domestik). Keyakinan seperti ini secara sadar atau tidak tumbuh dalam diri setiap orang (perempuan dan laki-laki) dan menjadi dasar berfikir yang melahirkan tindakan merendahkan posisi kalangan perempuan, dan meninggikan posisi kalangan laki-laki.

Jenis kelamin sosial yang disebut gender mengatur bagaimana seharusnya perempuan dan laki-laki bertingkah-laku dan berperan dalam kehidupan masyarakat. Norma, nilai-nilai dan budaya masyarakat kita telah menentukan peran perempuan dan laki-laki secara terpisah pada dua wilayah yang saling berhadap-hadapan, jika tidak boleh disebut bertentangan, yaitu ; wilayah rumah tangga (domestik) untuk perempuan dan di luar rumah tangga misalnya di masyarakat, di pemerintahan atau dalam negara yang disebut wilayah publik, untuk laki-laki. Begitulah sejak lama sekali dunia perempuan dan dunia laki-laki ditempatkan berdasarkan gendernya<sup>20</sup>.

Perempuan dan Politik selama ini politik telah didefenisikan dan dianggap sebagai sesuatu yang negatif; tentang perebutan kekuasaan, kotor, penuh intrik, dunianya kaum laki-laki di luar rumah dan bukan urusan perempuan. Politik dihubungkan hanya dengan kekuasaan atau mereka yang berkuasa. Perempuan (sebagai kaum yang diperintah) karena sering tidak berdaya dan tidak bersuara dianggap tidak terlibat politik. Sekarang kita harus membuat definisi yang baru (dan benar) tentang politik.

Namun kalangan feminis liberal memandang politik sebagai politik personal. Mereka menentang adanya perbedaan hak-hak politik antara laki-laki dan perempuan sehingga semua orang memiliki hak yang sama. Sehingga hak-hak politik tidak hanya hak dari laki-laki saja. Sehingga

---

<sup>20</sup> Mufidah Ch (Eds), *Paradigma Gender*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), hal. 4-5.

tidak ada lagi diskriminasi terhadap kalangan perempuan seperti pada masa politik tradisional yang menghilangkan hak-hak politik perempuan<sup>21</sup>.

Perjuangan yang sangat berat bagi kalangan perempuan untuk terlibat dalam wilayah publik karena adanya dikotomi antara wilayah publik dan wilayah domestik. Wilayah publik yang secara sosial untuk kalangan laki-laki sementara wilayah domestik untuk kalangan perempuan<sup>22</sup>. Kancah politik juga suatu hal yang sulit untuk dimasuki oleh perempuan. Selain itu tentang adanya dikotomi masyarakat antara wilayah publik miliknya laki-laki dan wilayah domestik wilayahnya perempuan juga adanya anggapan bahwa politik merupakan dunia yang keras dan hanya tepat untuk laki-laki.

Akibat dari diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat secara kultural mengakibatkan perempuan dalam kancah politik selama ini belum bisa maksimal. Dalam sejarah pemilihan umum, masyarakat Indonesia masih menjadikan perempuan sebagai pilihan kedua untuk menduduki jabatan politik. Hal ini bisa dibuktikan dari data yang ada dalam sejarah politik Indonesia sejak pemilihan pertama tahun 1955.

Pada pemilihan umum pertama tahun 1955 hanya ada 3,8 % perempuan di parlemen Indonesia dan tahun 1960-an ada 6,3 %. Angka tertinggi ada pada periode 1987-1992 yaitu 13 %. Tetapi turun lagi menjadi 12,5 peratus tahun 1992-1997, 10,8 % menjelang Soeharto jatuh, dan hanya 9 % pada periode 1999-2004. Sedangkan pada tahun 2014-2019, hanya ada 17,32% atau sekitar 97 perempuan saja yang menjadi anggota parlemen dari 560 orang<sup>23</sup>.

Minimnya partisipasi perempuan dalam politik lebih disebabkan adanya keragu-raguan dari perempuan terjun ke dunia politik. Selain itu, ada sebagian perempuan yang berpendapat bahwa politik itu keras dan hanya menjadi urusan laki-laki sehingga perempuan tidak perlu berpolitik. Pandangan tersebut barangkali membuat perempuan tidak mau memasuki dunia politik. Budaya patriarki nampaknya masih melekat pada masyarakat Indonesia<sup>24</sup>.

Namun, dewasa ini, partisipasi perempuan dalam politik semakin terlihat. Terbukti dengan adanya adanya peningkatan perempuan yang duduk di DPR RI walaupun pada periode 2014-2019 terjadi penurunan 1,07% dibandingkan periode 2009-2014.

## **B.2. Kesempatan Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Partai Politik dan Pemilu**

<sup>21</sup> Redaksi, *Kata dan Makna*, dalam Jurnal Perempuan 34, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2004), hal.99-100.

<sup>22</sup> Irwan Abdullah (Ed), *Sangkan Paran Gender*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal.3-4.

<sup>23</sup> Data dari Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2015 dan Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1995 di Indonesia*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999).

<sup>24</sup> Jeff Haynes, *Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia ketiga "Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggir*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000), hal.206-245 dan J.Eliseo Rocamora, *Nasionalisme Mencari Ideologi, Bangkit dan Runtuhnya PNI, 1946-1965*, (Jakarta: PT.Temprint, 1991).

Tepatnya pada tanggal 24 Juli 1984 Pemerintah RI telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan/CEDAW melalui UU No. 7 Tahun 1984 untuk meningkatkan penghormatan serta untuk memastikan setiap hak asasi manusia dapat diakses dan dinikmati oleh setiap perempuan di Indonesia, yang meliputi seluruh hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya<sup>25</sup>.

Negara RI juga meratifikasi Konvensi Internasional Hak Politik Perempuan melalui UU No.68 tahun 1956 serta Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita yang sering disingkat dengan Konvensi Wanita (UU No.7 Tahun 1984) sehingga merupakan kewajiban bagi negara untuk mengakomodasikan segala ketentuan yang dimuat dalam konvensi tersebut dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Dengan dikeluarkannya kebijakan baru berupa Undang-Undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu pasal 65 ayat 1, yang memperhatikan keterwakilan perempuan dalam tiap parpol sebesar 30 %, dan Undang-Undang No.2 tahun 2008, serta Undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang jaminan peluang peningkatan keterwakilan perempuan di arena politik, telah meyakinkan perempuan untuk berani terjun di kancah politik. Hal ini seolah akan meruntuhkan *stereotype* mengenai tertutupnya peluang bagi perempuan. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan akan semakin banyak perempuan yang berani menunjukkan kemampuannya untuk bisa menjadi politisi layaknya laki-laki. Dalam hal ini, peran media tidak dapat dinafikan dalam upaya membantu proses persuasive untuk meyakinkan perempuan terjun ke ranah ini. Media sebagai agen sosialisasi memuat informasi mengenai kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah.

### **B.3. Peran Sosialisasi Terhadap Partisipasi Politik Perempuan**

Sosialisasi adalah satu konsep umum yang bisa dimaknakan sebagai sebuah proses di mana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berpikir, merasakan, dan bertindak, di mana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Sosialisasi merupakan proses yang terus terjadi selama hidup kita<sup>26</sup>.

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan analisa dan semakin memahami pengertian dari sosialisasi politik dapat dilihat dari Michael Rush dan Philip Althoff bahwa sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sosialisasi politik ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan di mana individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Miryam Fithriati, Tesis, *Op.Cit.*, hal.139.140.

<sup>26</sup> Mohtar Mas' oed, dan Colin MacAndrews, *Op.Cit.*, hal.34.

<sup>27</sup> Variable kunci dalam sosialisasi politik adalah kepribadian individu. Hal ini pun berkaitan dengan pengalaman akan tetapi tetap dapat dibedakan daripadanya, seperti dijelaskan oleh J.P Guilford tentang kepribadian sebagai "pola unik

Pada dasarnya, sosialisasi memberikan kontribusi fundamental bagi kehidupan kita. Memberikan dasar atau fondasi kepada individu bagi terciptanya partisipasi yang efektif dalam masyarakat. Karena dengan adanya sosialisasi yang akan mempengaruhi pola pikir yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan kelak.

Agen sosialisasi politik baik yang dilakukan oleh individu maupun oleh institusi sangatlah penting pengaruhnya, jika ditinjau dari keputusan perempuan untuk aktif dalam partai politik. Kegiatan orangtua baik Bapak atau Ibu dalam politik baik sebagai aktivis politik atau pejabat dipemerintahan membuka peluang dan informasi terhadap informan lebih mendalam mengenai politik dan lembaga-lembaga politik. Situasi politik juga memiliki pengaruh terhadap informan untuk mengenal lebih tentang politik dan lembaga politik. Peran institusi politik yang diwujudkan dalam aktivitas politik seperti kegiatan partai ternyata telah membentuk kepribadian aktivis perempuan di masa kecil yang cinta akan politik. Kecintaan terhadap aktivitas politik terus terpelihara dalam benak aktivis perempuan hingga mereka telah menginjak remaja dan dewasa. Hal ini seperti dialami oleh para informan. Agen sosialisasi politik yang diperankan oleh keluarga, media massa, sekolah, organisasi sekolah dan kontak-kontak politik langsung melalui situasi politik yang sedang terjadi. Memang agen institusi politik berupa partai politik ketika melakukan aktivitas politik seperti kampanye tidak secara sengaja melakukan sosialisasi politik kepada masyarakat, namun aktivitas politik partai politik telah memberikan kontribusi berupa pendidikan politik agar semua elemen masyarakat tidak canggung untuk beraktivitas dalam partai politik termasuk perempuan.

Partisipasi politik perempuan juga dinilai cukup penting untuk memperbaiki nasib ketertindasan perempuan dalam kehidupan sekarang ini. Dengan terjun di dunia politik secara langsung melalui aktivitasnya dalam politik pandangan masyarakat mengatakan politik sebagai dunia laki-laki akan berkurang setidaknya dapat digunakan untuk mengontrol isu-isu gender melalui kebijakan yang tidak berorientasi pada ketimpangan dan pertimbangan gender.

Diantara aktivis politik perempuan, mayoritas informan memiliki keluarga dekat yang terlibat dalam politik praktis sebagai pengurus partai dan anggota DPR. Namun demikian, pengalaman sejak kecil terhadap aktivitas politik juga telah membentuk pribadi para informan tidak canggung bergabung dalam partai politik. Pengalaman masa kecil dari pengamatan terhadap aktivitas politik yang dilakukan oleh partai politik oleh aktivis-aktivis perempuan ternyata telah mempengaruhi tumbuhnya motivasi untuk aktif terjun dalam politik. Seperti informan yang

---

dari sifat-sifat” seseorang. Sifat-sifat (traits) ini didefinisikan sebagai “cara yang relative berkelanjutan sama dan dapat dibedakan, dengan mana individu yang bersangkutan dapat dibedakan dengan orang lain, dan dipandang dari tingkah laku politik, telah diberikan perhatian khususnya terhadap sifat-sifat “dihayati” bersama dalam pelbagai tingkatan oleh bagian terbesar dari jumlah penduduk. Lihat Michael Rush dan Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 25, 40-41

termotivasi karena sejak kecil biasa melihat aktivitas politik yang dilakukan kakak-kakaknya. Proses sosialisasi ini sebenarnya tidak disengaja oleh agen-agen tersebut namun aktivitas agen-agen tersebut telah berperan dalam pembentukan sikap perempuan sehingga terdorong untuk aktif terjun di politik.

Rekrutmen politik idealnya dilakukan setelah dilakukan pendidikan politik sehingga kader yang akan mewakili di lembaga politik benar-benar memahami tentang perjuangan partai dan apa saja yang akan diperjuangkan ketika duduk di lembaga politik. Sehingga keseriusan partai politik melakukan pendidikan politik terhadap para kadernya sangat penting dilakukan. Kemajuan atau kemunduran partai politik juga akan dipengaruhi oleh kader-kadernya yang duduk di lembaga politik baik di legislatif atau eksekutif.

Salah satu fungsi partai politik adalah rekrutmen politik. Menurut Miriam Budiardjo<sup>28</sup> rekrutmen politik adalah proses melalui mana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Untuk mengetahui kinerja partai politik di Indonesia, maka marilah kita lihat dari efektifitas parpol menurut fungsi ideal parpol, sebagai berikut :

*Pertama*, fungsi rekrutmen, proses rekrutmen di dasarkan atas karir politik di parpol, tawar-menawar kepentingan, dan juga "*the money reserve of candidate*" (mahar) bukan atas dasar "*the capability and credibility of candidate*". Beratnya persyaratan untuk mencalonkan diri melalui parpol dimana individu harus menyetor dana (mahar) yang nominalnya tidak sedikit juga menjadi salah satu faktor disfungsi rekrutmen parpol. Akibatnya parpol memonopoli proses recruitment ini yang kemudian menimbulkan praktek-praktek korupsi di tubuh parpol.

*Kedua*, fungsi komunikasi politik, proses ini berjalan searah dimana komunikasi bersifat top-down dan bukan down-top sehingga artikulasi kepentingan rakyat tidak berjalan yang berakibat tidak terakomodirnya kepentingan rakyat dalam proses pembuatan kebijakan public. Parpol lebih terkonsentrasi pada perjuangan kepentingan parpolnya. Janji-janji yang di obral saat kampanye tidak ada yang terealisasi.

*Ketiga*, fungsi sosialisasi politik, fungsi ini hanya dilakukan ketika waktu pemilu sudah dekat (kampanye), artinya ketika proses pemilu berakhir parpol lupa akan konstituentnya dan sibuk dengan target pencapaian kepentingan politik praktisnya. Kemudian ketika waktu pemilu sudah dekat, amnesia parpol atas konstituentnya sembuh. Ada anggapan yang mengatakan bahwa kerja partai politik di Indonesia dalam 5 tahun adalah 3 tahun pertama membangun konsolidasi politik

---

<sup>28</sup> *Ibid.* hal.14-17

untuk mencapai kepentingan politiknya dan 2 tahun berikutnya setelah masa suksesi sudah dekat yang dilakukan parpol adalah melakukan persiapan pemilu. Sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi politik dan perjuangan kepentingan umum yang seharusnya dilakukan justru di tinggalkan.

*Keempat*, fungsi manajemen konflik, bukannya manajemen konflik melainkan justru menjadi biang konflik sehingga instabilitas politik terjadi dimana penuh dengan pertarungan kepentingan antar elit, konflik antar parpol, konflik antar kelompok kepentingan dan konflik yang berdimensi horizontal antar masyarakat.

Dengan demikian, maka berbagai kekuatan tersebut secara sinergis akan mampu merumuskan dan melaksanakan strategi yang tepat melalui suatu proses dan mekanisme politik yang demokratis sehingga akan dihormati, dipatuhi, dan dilaksanakan dengan kesadaran yang mendalam bagi semua rakyat dan masyarakat pada umumnya. Pada era transparansi dan globalisasi terjadi perubahan yang sangat mendasar dibandingkan dengan pada era-era sebelumnya. Bila pada era sebelumnya pengaruh faktor-faktor pada tataran global relatif kecil dibandingkan dengan pengaruh faktor-faktor yang berkembang pada tataran regional maupun nasional, maka pada erasekarang ini tidak mustahil justru faktor-faktor perkembangan pada tataran global jauh lebih menyentuh langsung terhadap kepentingan dan kebutuhan akan perubahan dibandingkan dengan faktor-faktor yang berkembang di lingkungan regional dan bahkan nasional sekalipun. Banyak masalah nasional sangat sulit diselesaikan hanya dengan mempertimbangkan faktor-faktor dominan yang berada pada tataran nasional.

Masalah lainnya adalah secara internal kepartaian, meskipun partai politik adalah instrumen politik yang diharapkan mengembangkan demokratisasi, tetapi dalam ekstrukstur partai politikpun, ternyata nuansa patriarkhi ini masih menguat, sehingga amat menyulitkan kaum perempuan untuk berada pada posisi strategis dan pengambil kebijakan pada sebuah partai. Kalaupun ada tapi peran mereka masih tidak bisa membantu untuk mengurangi dominasi patriarkhi yang terjadi. Lebih banyak perempuan hanya diberi porsi mengurus posisi keperempuanan saja atau yang identik dengan dunia keperempuanan, sehingga dalam mekanisme selanjutnya maka akan menyulitkan bagi perempuan untuk tampil sebagai kandidat pemimpin.

Persoalan berikutnya adalah kemampuan secara finansial, juga sangat sedikit perempuan yang mempunyai kemandirian finansial sehingga mampu maju ke gelanggang dunia politik praktis seperti untuk maju menjadi pemimpin suatu daerah, yang tentunya memerlukan ongkos politik yang tidak sedikit. Akhirnya, sampai saat ini partisipasi dan peran politik perempuan masih terlihat rendah.

### **C. KESIMPULAN**

Sosialisasi politik. Sosialisasi politik menjadi pokok penting dalam menunjang kepercayaan masyarakat terhadap partai. Dari observasi dan wawancara yang dilakukan dengan responden, terungkap bahwa sosialisasi politik merupakan faktor dominan yang berperan penting dalam menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai. Sosialisasi politik yang positif akan memberikan dampak positif berupa tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Demikian juga sebaliknya, sosialisasi politik yang negatif menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik menjadi sangat rendah.

Sistem rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik belum dilakukan secara transparan karena penentuan masih ditentukan oleh kepengurusan tingkat pusat tanpa melibatkan para calon legislatif. Sehingga unsure subyektif masih saja berlaku atau bahkan unsure KKN masih dapat berlaku dalam penentuan nomor urut dan daerah pemilihan calon legislatif.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku:**

- Amal, Ichlasul, (Eds). *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta. 1996.
- Budiardjo, Miriam, *Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai*, PT. Gramedia, Jakarta, 1982.
- , *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, PT. Gramedia, Jakarta, 2007.
- Haynes, Jeff, *Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia ketiga "Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggir*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000.
- Mas'ood, Mohtar dan Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001.
- Michels, Robert, *Partai Politik, Kecenderungan Oligarki dalam Birokrasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 1984
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Kedua, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 1990.
- Siwi, Utami Tari, *Perempuan Politik Departemen: Sebuah Sketsa Perjuangan dan Pemberdayaan, 1999-2001*, Yogyakarta, Gama Media, 2001.
- Soetjipto, Ani, Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Melalui Reformasi Konstitusi dan Pemilu, dalam *Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan*, IDEA, 2003
- Sugiono, *Metode Penelitian Administratif*, Alfabeta, Bandung, 1994.
- Suyanto, Isbodroni, dalam *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995
- Wertheim, W.F., *Gelombang Pasang Emansipasi*, Garda Budaya dan ISAI, Jakarta, 1976.
- Ihromi, T.O. , *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, Yayasan Obor Indonesia Jakarta, 1995.

**Tesis:**

Fithtriati, Miryam, “*Peran Partai dan Perempuan Partai Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Menjelang Pemilu 2004 (Studi Kasus Pada Enam Partai Peserta Pemilu 2004)*”, Tesis Ilmu Politik, FISIP-UI, 2006.

**Jurnal:**

Jurnal, *Sistem Pemilu*, IDEA, Jakarta, 1998.